

Jurnal JTik (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)

DOI: <https://doi.org/10.35870/jtik.v10i1.5432>

Analisis Metakomunikasi Politik dalam Proyek Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

Agus Hitopa Sukma^{1*}, Irzan Soepriyadi²

^{1*,2} Program Studi Komunikasi, Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 (IBI-K57), Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia.

article info

Article history:

Received 25 August 2025

Received in revised form

10 September 2025

Accepted 1 November 2025

Available online January 2026.

Keywords:

Political Metacommunication;
IKN Nusantara; Symbolic
Communication; Legitimacy;
Counter-Narrative.

Kata Kunci:

Metakomunikasi Politik; IKN
Nusantara; Komunikasi
Simbolik; Legitimasi; Kontra-
Narasi.

abstract

The relocation of the State Capital (IKN) from Jakarta to Nusantara is one of the largest strategic projects initiated by the government. This policy is based on the excessive burden on Jakarta and the economic disparity between Java Island and other regions in Indonesia. The remarkably swift legislative process for the IKN Law has created a public perception that speed was prioritized over thorough deliberation, which has the potential to erode public trust. This study aims to reveal the hidden meanings, power dynamics, and underlying intentions behind political statements and actions related to IKN. This research uses a political metacommunications analysis approach, which serves to uncover the "message within the message" conveyed through verbal and non-verbal cues. The analysis was performed on the official government narrative, public counter-narratives and criticism, and the role of the media in the IKN metacommunication landscape. The findings indicate that the official government narrative attempts to frame IKN as a symbol of progress, equity, and unity, reinforced by the use of symbols like "Nusantara" and "Pohon Hayat". However, this narrative is confronted by a strong counter-narrative from civil society and academics who highlight the rushed legislative process, environmental impacts, and financial ambiguities. These implicit messages point to a "democratic deficit" and "financial vulnerability". The role of the media and social media dynamics also contributes to reinforcing these competing narratives. In conclusion, the legitimacy of the IKN project does not solely depend on the grand vision and physical development, but also on the complex interaction between explicit and implicit messages. The project's success will be determined by the government's ability to align its rhetoric with its actions, building genuine trust and accountability.

abstract

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara merupakan salah satu proyek strategis terbesar yang dicanangkan pemerintah. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh beban Jakarta yang terlalu berat dan ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dengan wilayah lain di Indonesia. Proses legislasi Undang-Undang IKN yang sangat cepat memunculkan persepsi publik bahwa prioritas diberikan pada kecepatan daripada musyawarah yang menyeluruh, yang berpotensi mengikis kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan metakomunikasi politik di balik proyek pemindahan IKN Nusantara. Analisis ini dilakukan untuk menggali makna tersembunyi, dinamika kekuasaan, dan niat yang mendasari di balik pernyataan dan tindakan politik terkait IKN. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis metakomunikasi politik, yang berfungsi untuk menggali "pesan di dalam pesan" yang disampaikan melalui isyarat verbal dan non-verbal. Analisis dilakukan terhadap narasi resmi pemerintah, kontra-narasi dan kritik publik, serta peran media dalam lanskap metakomunikasi IKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasi resmi pemerintah berupaya membingkai IKN sebagai simbol kemajuan, pemerataan, dan persatuan, diperkuat dengan penggunaan simbol seperti "Nusantara" dan "Pohon Hayat". Namun, narasi ini dihadapkan pada kontra-narasi yang kuat dari masyarakat sipil dan akademisi yang menyoroti proses legislasi yang terburu-buru, dampak lingkungan, dan ketidakjelasan finansial. Pesan-pesan tersirat ini menunjukkan adanya "defisit demokrasi" dan "kerentanan finansial". Peran media dan dinamika di media sosial turut memperkuat narasi yang saling bersaing ini. Kesimpulan, legitimasi proyek IKN tidak hanya bergantung pada visi besar dan pembangunan fisik, tetapi juga pada interaksi kompleks antara pesan eksplisit dan implisit. Keberhasilan proyek akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah untuk menyelaraskan retorika dengan tindakan nyata, membangun kepercayaan dan akuntabilitas sejati.

Corresponding Author. Email: agushitopa@gmail.com ^{1}.



Copyright 2026 by the authors of this article. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

1. Pendahuluan

Pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur merupakan salah satu proyek nasional terbesar yang dicanangkan oleh pemerintah. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh beban yang terlalu berat bagi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis. Data menunjukkan bahwa sekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, dengan kontribusi ekonomi Pulau Jawa mencapai 59% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (Al Azis, 2024). Selain itu, Jakarta menghadapi krisis ketersediaan air, konversi lahan yang masif, dan pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi, yang secara keseluruhan menyebabkan penurunan daya dukung lingkungan dan kualitas hidup (Sunardi, 2021). Pemindahan ibu kota bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan wilayah lain di Indonesia, mendorong pembangunan yang lebih merata, dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa (Syarief, 2022).

Presiden Joko Widodo pertama kali mengumumkan rencana pemindahan ibu kota pada 2019, dengan menegaskan urgensinya dalam Pidato Kenegaraan tahun tersebut (Widodo, 2019). Proses legislasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) berlangsung dengan kecepatan yang luar biasa. Undang-undang ini disahkan hanya dalam 111 hari setelah rancangan diperkenalkan, dengan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang hanya memakan waktu 42 hari, termasuk sesi diskusi maraton selama 16 jam (Tamin, 2022). Kecepatan luar biasa dalam proses legislasi ini, meskipun pemerintah menekankan urgensi yang telah lama ada, secara implisit mengkomunikasikan pesan bahwa prioritas diberikan pada kecepatan daripada musyawarah publik yang lebih menyeluruh, yang berpotensi mengikis integritas prosedural (d'Haenens & Masduki, 2023). Hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa solusi yang ditawarkan pemindahan IKN dan kerangka hukumnya mungkin telah mengesampingkan proses demokratis yang kuat, yang pada gilirannya dapat memicu tantangan terhadap legitimasi di kemudian hari (Putra, 2024). Kontradiksi antara narasi urgensi dan proses legislasi yang terburu-buru ini berpotensi mengurangi

kepercayaan publik, meskipun niat baik yang dinyatakan oleh pemerintah. Dalam kebijakan publik, khususnya pada proyek berskala besar seperti IKN, analisis metakomunikasi politik menjadi sangat relevan. Metakomunikasi dapat didefinisikan sebagai komunikasi tentang komunikasi itu sendiri, yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara komunikator dan komunikan selama proses komunikasi, serta menyampaikan sikap dan perasaan pengirim terhadap pendengar. Metakomunikasi merupakan "pesan dalam pesan" yang sering kali disampaikan melalui isyarat verbal dan non-verbal, seperti nada suara, bahasa tubuh, atau bahkan pilihan kata yang tersirat (Fadhilah, 2022). Dalam arena politik, metakomunikasi memungkinkan kita untuk menggali makna tersembunyi, dinamika kekuasaan, dan niat yang mendasari di balik pernyataan atau tindakan politik (Tapsell, 2023). Pemerintah dan aktor politik lainnya secara strategis menggunakan metakomunikasi untuk membentuk persepsi publik dan membangun legitimasi kebijakan mereka.

Penggunaan simbol, isyarat non-verbal, dan pembingkai pesan politik dapat melampaui sekadar penyampaian informasi; tujuannya adalah untuk memengaruhi sikap dan perilaku secara tidak sadar. Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat berupaya mengendalikan narasi dan penerimaan publik secara halus (Masduki, 2021). Dengan memahami metakomunikasi, analisis dapat dilakukan terhadap bagaimana pemerintah berupaya membingkai IKN, misalnya sebagai simbol kemajuan, dan bagaimana berbagai pemangku kepentingan menginterpretasikan atau bahkan melawan pesan-pesan implisit ini (Azzahra, dkk., 2024). Visi resmi IKN Nusantara adalah untuk menjadi "kota dunia untuk semua". Visi ini lebih lanjut digambarkan sebagai kota yang dibangun dan dikelola untuk menjadi kota berkelanjutan, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan simbol identitas nasional yang mencerminkan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Republik Indonesia, 2025). Secara spesifik, IKN dirancang sebagai "kota hutan pintar" (smart forest city), yang mengintegrasikan teknologi, ketahanan, keberlanjutan, dan inklusivitas. Konsep ini mencakup penggunaan material bangunan rendah karbon, penetapan 50% hingga 70% lahan sebagai ruang

terbuka hijau, dan penetapan target untuk mencapai net zero emission pada tahun 2045 (Mandala Consulting, 2025). Penekanan yang berulang terhadap atribut-atribut seperti "berkelanjutan," "kota hutan pintar," "kota dunia untuk semua," dan "penggerak ekonomi masa depan" menyampaikan pesan implisit yang kuat. Pesan ini menggambarkan IKN bukan sekadar relokasi fisik ibu kota, melainkan sebuah re-imajinasi fundamental terhadap masa depan Indonesia. Narasi ini berupaya memposisikan proyek ini di luar siklus politik jangka pendek, menggambarkan sebagai usaha nasional yang esensial dan berjangka panjang. Secara implisit, pesan ini mencerminkan komitmen terhadap praktik terbaik global serta perubahan dari model pembangunan yang konvensional. Narasi ini juga bertujuan untuk meredam kritik terkait dampak lingkungan dan sosial, dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam identitas inti IKN (Ghofur, dkk., 2024). Pemilihan nama dan desain IKN sarat dengan simbolisme nasional yang bertujuan membangkitkan rasa kebanggaan dan persatuan. Nama "Nusantara," yang berasal dari bahasa Sansekerta "Nusa" (pulau) dan "Antara" (sekitar)

secara harfiah berarti "pulau-pulau di luar Jawa". Istilah ini pertama kali digunakan oleh Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 dan dihidupkan kembali oleh Ki Hadjar Dewantara pada tahun 1920-an untuk menggambarkan persatuan kepulauan Indonesia (Marwing, 2021). Pemilihan nama ini secara implisit mengkomunikasikan visi Indonesia-sentris, menjauh dari dominasi perspektif Jawa-sentris yang selama ini mendominasi. Logo resmi IKN, "Pohon Hayat Nusantara," terinspirasi dari simbolisme pohon yang melambangkan sumber kehidupan dan kekayaan hayati Indonesia. Desain logo ini berakar pada lima ideologi bangsa (Pancasila), dengan tujuh batang yang mengalir melambangkan pulau-pulau besar di Indonesia, serta 17 bunga yang mekar untuk melambangkan kemerdekaan yang abadi. Logo ini, bersama dengan font "IKN Sutasoma" yang terinspirasi oleh aksara Pallawa kuno di Kutai, dirancang untuk menjadi simbol visual yang universal namun tetap menghormati warisan budaya bangsa, sekaligus merayakan peradaban baru Indonesia (Tamin, 2022).

Tabel 1. Ringkasan Narasi Resmi dan Simbolisme Kunci IKN

Tema Kunci	Simbol Spesifik	Makna Tersirat/Tujuan Metakomunikatif
Transformasi Nasional & Pemerataan	Pemindahan Ibu Kota ke luar Jawa, Pidato Jokowi tentang "Indonesia Maju"	IKN adalah langkah fundamental untuk masa depan Indonesia yang lebih adil dan merata, bukan sekadar relokasi fisik. Menunjukkan kepemimpinan visioner dan warisan.
Keberlanjutan & Modernitas	Konsep "Smart Forest City," target Net Zero Emission 2045	IKN adalah model pembangunan baru yang ramah lingkungan dan berteknologi tinggi, selaras dengan praktik global terbaik. Mengantisipasi kritik lingkungan.
Identitas Nasional & Persatuan	Nama "Nusantara," Logo "Pohon Hayat Nusantara," Desain "Istana Garuda"	IKN adalah proyek untuk seluruh bangsa Indonesia, berakar pada sejarah dan budaya, melampaui sekat politik. Membangkitkan kebanggaan dan persatuan.
Kepercayaan & Kepastian Investasi	Pernyataan "Tidak Perlu Ragu" dari Jokowi, Analogi "Gadis Desa Cantik" dari Bahlil, Groundbreaking proyek	Pemerintah berkomitmen penuh dan memberikan jaminan bagi investor dan publik, mengindikasikan peluang besar dan mitigasi risiko. Namun, kebutuhan untuk terus meyakinkan juga menunjukkan adanya keraguan yang perlu diatasi.

Teori metakomunikasi menjelaskan komunikasi yang terjadi di balik pesan yang disampaikan, baik secara verbal maupun non-verbal. Dalam ranah politik, teori ini memberi ruang untuk memahami dinamika yang tersembunyi di balik pernyataan atau tindakan

pemerintah. Melalui metakomunikasi, pemerintah dapat membentuk persepsi publik dan memperkuat legitimasi kebijakan mereka tanpa harus menyatakan tujuan secara langsung. Penggunaan simbol-simbol dan isyarat non-verbal adalah cara yang digunakan

untuk memengaruhi sikap masyarakat secara tidak langsung. Dalam hal ini, pemerintah dapat membingkai kebijakan atau proyek tertentu untuk mendapatkan dukungan publik melalui cara-cara yang lebih halus dan tak tampak. Teori framing menggambarkan bagaimana media atau pihak politik menyusun atau menyajikan suatu isu untuk memengaruhi cara pandang audiens. Dalam hal pemindahan ibu kota, pemerintah berusaha memosisikan proyek ini sebagai simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Namun, ada kelompok lain yang lebih kritis, menilai adanya dampak buruk terhadap lingkungan, kurangnya partisipasi dari masyarakat lokal, dan keraguan mengenai keberlanjutan finansial. Penyajian informasi yang berbeda ini memengaruhi cara masyarakat memandang proyek tersebut, apakah sebagai peluang besar atau sebagai kebijakan yang problematik. Teori komunikasi simbolik berfokus pada penggunaan simbol-simbol yang membawa makna lebih dalam.

Dalam proyek IKN, pemerintah menggunakan simbolisme yang berkaitan dengan identitas nasional untuk menciptakan rasa persatuan. Nama "Nusantara" dan simbol "Pohon Hayat" memiliki pesan yang lebih besar daripada sekadar representasi fisik; keduanya mengkomunikasikan semangat Indonesia-sentris dan mencoba untuk menghapuskan dominasi perspektif Jawa-sentris. Simbol-simbol ini bertujuan untuk menarik dukungan dengan mengaitkan proyek tersebut dengan nilai-nilai budaya bersama yang lebih luas dan menggugah perasaan kolektif. Terakhir, teori legitimasi membahas bagaimana proyek-proyek seperti IKN diterima oleh publik. Legitimasi ini tidak hanya berasal dari narasi resmi yang disampaikan pemerintah, tetapi juga dari respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Meski pemerintah berusaha menunjukkan IKN sebagai proyek yang menguntungkan, kritik terkait kecepatan legislasi, dampak sosial, dan potensi risiko finansial menandakan adanya ketidakpastian dalam penerimaan publik. Legitimasi penuh akan tercapai jika pesan yang disampaikan tidak hanya bersifat retorik, tetapi juga mencerminkan transparansi dan akuntabilitas yang jelas, serta menangani dengan tepat kekhawatiran yang ada.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan analisis metakomunikasi politik untuk mengungkap makna yang tersembunyi atau "pesan dalam pesan" yang terkandung dalam komunikasi politik terkait proyek IKN Nusantara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya melihat pesan eksplisit yang disampaikan, tetapi juga untuk menganalisis cara pesan tersebut disampaikan, baik melalui isyarat verbal, non-verbal, maupun simbolisme. Selain itu, pendekatan ini juga berfokus pada makna implisit yang menyertainya serta dinamika kekuasaan yang terkandung dalam komunikasi tersebut. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis. Data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk mendeskripsikan serta menafsirkan fenomena metakomunikasi yang muncul dalam wacana publik mengenai IKN. Objek utama penelitian ini adalah komunikasi politik yang berkembang di ruang publik, baik yang berasal dari pemerintah, kelompok masyarakat, maupun media.

Penelitian ini mencakup beberapa aspek berikut:

- 1) Komunikasi Resmi Pemerintah
Pidato, pernyataan, logo, dan simbol yang digunakan oleh Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintah terkait IKN.
- 2) Kontra-Narasi dan Kritik Publik
Pernyataan dari masyarakat sipil, akademisi, dan publik yang menyoroti isu-isu seperti proses legislasi yang terburu-buru, dampak lingkungan, dan tantangan finansial.
- 3) Pemberitaan Media
Pembingkai (I) isu IKN oleh media nasional dan internasional, serta sentimen yang muncul di media sosial.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan analisis dokumen, dengan fokus pada:

- 1) Analisis Teks
Menganalisis transkrip pidato kenegaraan, pernyataan resmi, serta dokumen hukum seperti Undang-Undang IKN.
- 2) Analisis Visual dan Simbolik
Menganalisis penggunaan logo resmi, desain arsitektur, dan simbol visual lainnya yang terkait dengan proyek IKN.

3) Analisis Berita dan Survei

Mengkaji pemberitaan dari berbagai media dan hasil survei persepsi publik untuk mengidentifikasi pola pembingkai dan sentimen yang dominan.

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan metode analisis metakomunikasi yang melibatkan beberapa langkah berikut:

1) Identifikasi Pesan Eksplisit

Menyusun pemahaman tentang pesan yang disampaikan secara literal oleh pemerintah, kritikus, dan media.

2) Identifikasi Pesan Implisit (Metakomunikasi)

Menganalisis makna yang tersembunyi di balik pesan eksplisit. Sebagai contoh, "kecepatan luar biasa" dalam legislasi UU IKN mengkomunikasikan pesan bahwa prioritas diberikan pada kecepatan daripada musyawarah yang lebih mendalam.

3) Identifikasi Sumber dan Aktor

Menentukan siapa yang menjadi komunikator (pemerintah, masyarakat sipil, media) dan siapa yang menjadi komunikan (publik, investor).

4) Analisis Interaksi dan Dampak

Menganalisis bagaimana narasi resmi pemerintah berinteraksi dengan kontra-narasi dan bagaimana interaksi ini memengaruhi persepsi publik serta legitimasi proyek IKN.

Dengan pendekatan ini, penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana proyek IKN dikomunikasikan dan diterima oleh berbagai pihak, serta bagaimana metakomunikasi politik membentuk persepsi dan legitimasi proyek tersebut di ruang publik.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Kritik Terhadap Proses Legislasi UU IKN: Kecepatan dan Absennya Partisipasi Publik

Proses pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) telah mendapatkan kritik tajam terkait kecepatannya yang luar biasa. Proses legislasi ini disebut "super cepat," dengan pembahasan di DPR hanya

berlangsung sekitar satu bulan setelah tim panitia khusus (Pansus) IKN dibentuk pada 7 Desember 2021. Kelompok masyarakat sipil dan akademisi berpendapat bahwa percepatan ini mencerminkan kurangnya partisipasi publik yang bermakna, khususnya dari masyarakat lokal dan adat yang langsung terdampak oleh proyek ini. Proses yang terburu-buru ini, secara implisit, mengkomunikasikan bahwa kepentingan eksekutif diutamakan dibandingkan dengan proses demokratis yang deliberatif. Tidak adanya partisipasi yang substansial dari komunitas-komunitas yang terdampak menunjukkan bahwa suara mereka tidak dihargai, atau bahwa urgensi proyek mengesampingkan prinsip-prinsip tata kelola yang lebih inklusif. Hal ini mengarah pada persepsi "defisit demokrasi," di mana proses pembuatan kebijakan itu sendiri dianggap bertentangan dengan tujuan IKN untuk mencapai pemerataan dan kesetaraan.

Dampak Sosial dan Lingkungan: Suara Masyarakat Adat dan Kekhawatiran Ekologis

Narasi pemerintah yang menggambarkan IKN sebagai "kota hutan pintar" dan sebagai proyek pembangunan yang inklusif bertentangan dengan kekhawatiran yang muncul terkait dampak sosial dan lingkungan. Salah satu masalah utama yang muncul adalah ancaman terhadap ruang hidup masyarakat adat dan potensi penggusuran mereka. Setidaknya 21 komunitas adat diperkirakan akan terdampak di wilayah yang direncanakan untuk pembangunan IKN, dengan kasus seperti komunitas Pemaluan Sepaku yang menemukan lahan mereka ditandai untuk pembangunan tanpa persetujuan mereka. Selain itu, penghancuran situs-situs sakral di Maridan menambah kecemasan akan dampak negatif sosial yang lebih luas. Selain dampak sosial, kekhawatiran ekologis juga semakin menonjol. Meskipun IKN digadang-gadang sebagai "kota hutan pintar," data menunjukkan deforestasi yang signifikan, dengan lebih dari 20.000 hektar hutan alam yang sudah berada di bawah konsesi pembangunan. Hal ini memunculkan keraguan mengenai komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan lingkungan. Meskipun pemerintah menekankan narasi tentang "kota hijau," dampak lingkungan yang tercatat mengirimkan pesan implisit yang kuat: bahwa proyek ini lebih memprioritaskan pembangunan cepat daripada pelestarian lingkungan dan hak-hak

masyarakat lokal. Kontradiksi antara klaim pemerintah dan kenyataan yang dirasakan mengarah pada kesan bahwa retorika keberlanjutan mungkin lebih merupakan bentuk "greenwashing" daripada komitmen ekologis yang sejati.

Risiko Ekonomi dan Finansial: Perdebatan Anggaran, Tantangan Investasi, dan Isu Greenwashing

Aspek finansial dari proyek IKN juga menjadi sumber kritik utama. Dengan perkiraan biaya mencapai Rp 466,9 triliun, hanya 20% dari total biaya tersebut yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara sisanya diharapkan berasal dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi swasta. Meskipun ada banyak *Letter of Intent* (LoI) dari investor asing, terdapat kekhawatiran mengenai tingginya risiko investasi bagi investor swasta, dan lambatnya realisasi investasi asing menjadi perhatian. Beberapa akademisi mengkritik bahwa fokus yang berlebihan pada IKN mengorbankan pembangunan infrastruktur lainnya yang lebih mendesak. Selain itu, isu "greenwashing" muncul dalam konteks pembiayaan berkelanjutan, dengan banyak pihak mempertanyakan apakah klaim "kota hijau" IKN dapat dibuktikan dengan kriteria yang jelas dan dampak nyata. Penekanan yang terus-menerus pada daya tarik investasi asing, yang dibarengi dengan laporan mengenai lambatnya perjanjian definitif dan keengganan investor, mengungkapkan pesan tersirat tentang kerentanan finansial proyek ini. Meskipun pemerintah berusaha untuk mempromosikan IKN

sebagai peluang investasi, keraguan yang ada di pasar mencerminkan bahwa pesan tentang risiko finansial lebih kuat daripada pesan mengenai potensi keuntungan. Terlebih lagi, penerapan konsep "greenwashing" pada klaim "kota hijau" IKN menciptakan pertanyaan tentang integritas jangka panjang proyek ini dan apakah komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan benar-benar tulus.

Analisis Metakomunikatif dalam Kritik: Pesan Tersirat Mengenai Transparansi, Akuntabilitas, dan Keadilan

Survei publik menunjukkan kekhawatiran signifikan terhadap besarnya anggaran (82,3%) dan potensi kerusakan lingkungan (69%) yang ditimbulkan oleh pemindahan IKN. Kritik-kritik ini tidak hanya berfokus pada proyek IKN itu sendiri, tetapi juga pada prinsip-prinsip tata kelola dan etika yang mendasarinya. Tema-tema yang konsisten dalam kritik publik dan masyarakat sipil seperti kurangnya partisipasi, pengabaian lingkungan, dan ketidakjelasan finansial secara kolektif mengirimkan pesan implisit tentang erosi kepercayaan publik terhadap proses pemerintahan. Kritik ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa pemerintah dianggap kurang transparan, kurang akuntabel, dan tidak adil secara sosial, meskipun ada pernyataan resmi yang dibuat untuk membangun citra positif. Jika pesan ini tidak ditangani dengan serius, hal ini dapat merusak legitimasi proyek IKN dan memengaruhi legitimasi kebijakan publik di masa depan, dengan dampak yang lebih luas daripada sekadar proyek ini.

Tabel 2. Isu-Isu Kritis dan Sumber Kontra-Narasi IKN

Isu Kritis	Contoh/Insiden Spesifik	Sumber Kritik	Pesan Metakomunikatif Tersirat
Proses Legislasi Terburu-buru	Pengesahan UU IKN dalam waktu sangat singkat (1 bulan efektif di DPR)	Masyarakat sipil, akademisi	Prioritas kecepatan di atas deliberasi demokratis; pengabaian partisipasi publik.
Dampak Sosial & Penggusuran	Ancaman terhadap 21 komunitas adat, penandaan lahan tanpa persetujuan, penghancuran situs sakral	Masyarakat adat, WALHI, akademisi	Pembangunan mengorbankan hak-hak lokal; retorika inklusivitas tidak sejalan dengan realitas di lapangan.
Dampak Lingkungan	Deforestasi di area konsesi meskipun narasi "forest city"; peningkatan ISPA di wilayah penyangga	WALHI, akademisi	Klaim keberlanjutan lingkungan mungkin merupakan "greenwashing"; pembangunan mengancam ekosistem.

Risiko Finansial & Anggaran Besar	Kekhawatiran biaya Rp 466,9 triliun; lambatnya realisasi investasi asing; fokus berlebihan pada IKN	Publik (survei), ekonom, akademisi	Kerentanan finansial proyek; ketidakpastian sumber dana; potensi beban utang negara.
Kurangnya Transparansi & Akuntabilitas	Ketidakjelasan pendanaan, kurangnya informasi detail proyek	Publik, masyarakat sipil	Pemerintah kurang terbuka; legitimasi proyek rapuh jika tidak ada akuntabilitas.

Peran Media dalam Lanskap Metakomunikasi IKN (Strategi Agenda-Setting dan Framing Media Nasional Terhadap IKN)

Media massa memiliki peran kunci dalam membentuk opini publik, terutama melalui strategi *agenda-setting* dan *framing*. *Agenda-setting* mengacu pada kemampuan media untuk menentukan isu mana yang dianggap penting oleh publik, sementara *framing* adalah cara media membingkai dan menyajikan suatu isu yang memengaruhi cara audiens memahami peristiwa tersebut. Konsentrasi kepemilikan media dan afiliasi politik pemiliknya sering kali memengaruhi produksi berita dan dapat menyebabkan bias dalam pemberitaan. Dalam hal IKN, terdapat perbedaan yang jelas dalam pembingkaiannya oleh media nasional. Beberapa media lebih cenderung untuk menyoroti aspek positif proyek, seperti kemajuan infrastruktur atau potensi ekonomi, yang mendukung narasi pemerintah. Di sisi lain, media lain lebih fokus pada kritik publik, seperti kekhawatiran terhadap anggaran yang besar, dampak lingkungan, serta kurangnya partisipasi masyarakat, yang mengarah pada pembingkaiannya yang lebih kritis terhadap proyek ini.

Kekuatan media dalam *agenda-setting* dan *framing* menunjukkan bahwa media tidak hanya melaporkan fakta, tetapi juga membentuk cara pandang publik tentang IKN. Ketika media dengan afiliasi politik tertentu membingkai proyek IKN secara positif, mereka memperkuat pesan pemerintah tentang kemajuan dan legitimasi. Sebaliknya, media yang lebih kritis cenderung memperkuat kontra-narasi yang mengimplikasikan ketidaktransparanan atau ketidakmampuan pemerintah. Dinamika ini menunjukkan bahwa media berfungsi sebagai medan pertempuran bagi pesan-pesan tersirat yang bersaing, yang pada akhirnya memengaruhi persepsi publik dan penerimaan terhadap proyek tersebut.

Dinamika Opini Publik dan Sentimen Media Sosial Terhadap IKN (Analisis Hasil Survei Persepsi Publik)

Survei publik menunjukkan sentimen yang beragam terhadap IKN. Sebuah survei yang dilakukan pada Mei 2022 mengungkapkan bahwa 55% responden setuju bahwa Jakarta sudah tidak layak lagi menjadi ibu kota negara, yang menunjukkan adanya penerimaan umum terhadap ide pemindahan ibu kota. Namun, pada saat yang sama, mayoritas responden (82,3%) mengkhawatirkan besarnya anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini, sementara 69% lainnya khawatir akan potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa 48,2% masyarakat meminta agar pemindahan IKN ditunda. Survei terbaru pada tahun 2025 juga menunjukkan peningkatan kekhawatiran publik terhadap dampak lingkungan dari proyek ini. Hasil survei ini menggambarkan bahwa meskipun ada penerimaan terhadap pemindahan ibu kota, keraguan dan kekhawatiran mengenai pelaksanaan IKN terutama terkait aspek finansial dan lingkungan masih cukup besar. Hal ini mengindikasikan bahwa komunikasi resmi pemerintah, meskipun menyatakan keyakinan bahwa proyek ini tidak perlu diragukan, belum mampu sepenuhnya mengatasi kecemasan mendasar yang ada di masyarakat. Penerimaan yang "bersyarat" ini secara implisit menuntut transparansi dan akuntabilitas lebih besar, yang menunjukkan bahwa legitimasi proyek ini masih rapuh dan sangat bergantung pada penanganan kekhawatiran publik yang spesifik.

Platform Media Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Persepsi IKN

Platform media sosial seperti *Twitter* (sekarang *X*) dan *TikTok* telah menjadi barometer penting dalam mengukur sentimen publik secara real-time terhadap IKN. Analisis sentimen di media sosial menunjukkan bahwa terdapat beragam sentimen, baik positif, negatif, maupun netral, yang mencerminkan

pandangan masyarakat yang sangat beragam terhadap proyek ini. Media sosial berfungsi sebagai ruang gema (*echo chambers*), di mana pesan-pesan, baik yang mendukung maupun yang kritis terhadap IKN, diperkuat dan menyebar dengan cepat. Dominasi sentimen tertentu, apakah itu positif, negatif, atau netral, menunjukkan keberhasilan atau kegagalan strategi *metakomunikasi* yang digunakan oleh berbagai pihak dalam beresonansi dengan komunitas online. Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital bukan hanya mencerminkan, tetapi juga secara aktif membentuk persepsi publik, di mana isyarat implisit dan daya tarik emosional dapat memperkuat narasi-narasi yang ada dan, dalam beberapa kasus, menantang kendali resmi terhadap wacana.

Representasi IKN dalam Media Internasional: Perspektif dan Implikasi

Cakupan media internasional terhadap IKN memiliki dampak signifikan, terutama dalam menarik investasi asing. Sebagai contoh, surat kabar tertua berbahasa Inggris di Jepang, *The Japan Times*, mengakui ambisi besar Presiden Joko Widodo dalam merencanakan pemindahan ibu kota namun juga mempertanyakan sumber pendanaan dan potensi kegagalan proyek. Laporan lainnya mengungkapkan dukungan finansial dari lembaga internasional seperti *Asian Development Bank* (ADB) dan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB), serta minat dari perusahaan-perusahaan besar di Singapura dan Korea Selatan. Fokus media internasional pada kelayakan finansial IKN menyampaikan pesan tersirat kepada calon investor asing bahwa meskipun Indonesia memproyeksikan kepercayaan diri, komunitas keuangan internasional tetap berhati-hati dan menuntut bukti konkret mengenai pendanaan yang stabil dan tata kelola yang baik.

Kontras antara upaya pemerintah untuk mempromosikan IKN sebagai proyek besar yang ambisius dan pembingkai skeptis dari media internasional menunjukkan bahwa pesan tersirat tentang risiko masih dominan di tingkat global. Hal ini memengaruhi keseluruhan narasi mengenai "kepercayaan investasi" di proyek IKN. Penyebutan lembaga keuangan internasional dan perusahaan-perusahaan tertentu dalam pemberitaan ini membawa pesan tersirat mengenai validasi internasional yang dapat dimanfaatkan oleh

pemerintah Indonesia untuk meredakan persepsi negatif dan memperkuat narasi positif yang telah dibangun.

Implikasi Metakomunikasi Politik Terhadap Legitimasi dan Keberlanjutan IKN

Legitimasi proyek IKN sangat dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara narasi resmi pemerintah dan kontra-narasi yang muncul dari publik dan masyarakat sipil. Pemerintah secara konsisten berusaha untuk mempromosikan IKN sebagai simbol identitas nasional, pembangunan yang merata, dan sebagai contoh dari "kota hutan pintar" yang modern dan berkelanjutan. Pesan-pesan ini dirancang untuk membangkitkan rasa kebanggaan dan dukungan dari masyarakat. Namun, narasi ini dihadapkan pada kontra-narasi yang kuat, yang menyoroti kekhawatiran terkait proses legislasi yang terburu-buru, dampak sosial dan lingkungan yang mungkin terjadi, serta tantangan finansial yang dihadapi oleh proyek ini. Interaksi yang terus berlanjut antara narasi aspiratif pemerintah dan kontra-narasi kritis, yang tercermin dalam pembingkai media dan sentimen publik, mengirimkan pesan implisit bahwa legitimasi IKN "dipertanyakan." Proyek ini belum diterima secara universal dan terus berjuang untuk mendapatkan kepercayaan publik serta dukungan dari investor. Keberhasilan pembangunan fisik IKN tidak akan cukup untuk membangun legitimasi penuh jika pesan-pesan tersirat mengenai transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial tidak ditangani dengan efektif, dan jika tidak diintegrasikan dengan realitas pelaksanaan proyek ini.

Tantangan Keberlanjutan IKN di Tengah Dinamika Politik Pasca-Jokowi dan Persepsi Publik

Keberlanjutan proyek IKN di masa depan sangat bergantung pada dinamika politik setelah kepemimpinan Presiden Jokowi. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyatakan komitmennya untuk melanjutkan dan bahkan mempercepat pembangunan IKN, menjadikannya salah satu dari enam program prioritasnya. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan eksplisit tersebut dengan indikasi yang muncul dalam dokumen perencanaan. IKN tidak dimasukkan dalam "lima prioritas utama" Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 di bawah

pemerintahan Prabowo, di mana ketahanan pangan dan pertahanan menjadi prioritas utama. Selain itu, alokasi anggaran untuk IKN dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 hanya sebesar Rp 143,1 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan dengan alokasi sebesar Rp 48,8 triliun untuk periode 2025-2029 secara keseluruhan. Meskipun Prabowo secara eksplisit menyatakan komitmennya terhadap IKN, ketidakhadiran IKN dalam lima prioritas strategis utama dalam RPJMN dan alokasi anggaran 2025 yang lebih rendah mengirimkan pesan tersirat tentang "pergeseran prioritas politik." Pesan ini menunjukkan bahwa meskipun proyek ini akan dilanjutkan, intensitas atau sentralitasnya dalam agenda pemerintahan baru mungkin lebih rendah daripada di bawah pemerintahan Jokowi. Perubahan ini dapat memengaruhi kepercayaan investor dan persepsi publik tentang kelayakan jangka panjang proyek ini, terlepas dari jaminan verbal, karena tindakan (alokasi anggaran dan rencana strategis) sering kali berbicara lebih keras daripada kata-kata dalam *metakomunikasi politik*.

Peran Metakomunikasi dalam Membangun Kepercayaan, Partisipasi dan Akuntabilitas

Analisis keseluruhan menunjukkan bahwa keberhasilan dan legitimasi proyek mega seperti IKN, serta tata kelola yang lebih luas, tidak hanya bergantung pada kebijakan eksplisit atau visi besar, tetapi juga pada pesan-pesan implisit yang disampaikan melalui tindakan, proses, dan respons terhadap kritik. Kepercayaan publik berisiko jika negara menghindari dari akuntabilitas, dan transparansi sangat penting dalam membangun kepercayaan publik. Pesan tersirat yang paling penting dari analisis ini adalah bahwa keberhasilan dan legitimasi proyek seperti IKN, serta tata kelola yang lebih luas, bergantung tidak hanya pada kebijakan eksplisit atau visi besar, tetapi juga pada pesan-pesan implisit yang disampaikan melalui tindakan, proses, dan respons terhadap kritik. Ketika *metakomunikasi* mengisyaratkan kurangnya transparansi, akuntabilitas, atau partisipasi yang tulus (seperti yang terlihat dalam kasus IKN dan UU BUMN), hal tersebut mengikis kepercayaan publik dan merusak "integritas tata kelola," yang sangat penting untuk pembangunan nasional jangka panjang. Keberhasilan IKN pada akhirnya akan

bergantung pada apakah pemerintah dapat menyelaraskan pesan-pesan tersiratnya dengan cita-cita yang dinyatakan, menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi yang tulus daripada sekadar mengelola persepsi.

Rekomendasi Strategis

Berdasarkan analisis *metakomunikasi politik* yang komprehensif terhadap proyek IKN Nusantara dan kebijakan terkait, beberapa rekomendasi strategis dapat dirumuskan untuk berbagai pemangku kepentingan. Untuk pemerintah, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang perlu diterapkan untuk meningkatkan keberlanjutan dan legitimasi proyek IKN. Pertama, pemerintah harus memperkuat mekanisme partisipasi publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ini mencakup penerapan konsultasi publik yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga melibatkan dialog yang tulus, terutama dengan komunitas yang terdampak langsung oleh proyek ini. Kurangnya partisipasi, yang dapat menghasilkan persepsi tentang "defisit demokrasi" dan "pengabaian hak-hak lokal," dapat diperbaiki dengan pendekatan yang lebih terbuka dan partisipatif. Selanjutnya, untuk menjamin transparansi finansial, pemerintah perlu memberikan rincian yang jelas mengenai sumber pendanaan, pengeluaran, dan perjanjian investasi IKN yang dapat diakses publik. Transparansi semacam ini dapat mengatasi kekhawatiran terkait kerentanan finansial dan membangun kepercayaan investor. Dalam hal dampak lingkungan dan sosial, pemerintah juga perlu menyusun rencana mitigasi yang jelas dan terverifikasi untuk meminimalkan dampak negatif serta memastikan akuntabilitas atas setiap kerusakan yang terjadi. Tidak hanya mengandalkan branding "kota hutan," namun perlu ada bukti nyata dari langkah-langkah mitigasi yang terimplementasi. Terakhir, penting bagi pemerintah untuk meninjau ulang implikasi UU BUMN 2025 terkait dengan akuntabilitas, memastikan pengawasan yang lebih kuat dan mencegah potensi "impunitas," yang dapat merusak integritas tata kelola. Bagi media, independensi editorial dan etika jurnalistik harus tetap dijaga. Media, terutama yang tergabung dalam konglomerat dengan afiliasi politik, harus menjaga independensi editorial untuk menghindari "pengaruh oligarki" yang dapat merusak peran media sebagai pilar demokrasi. Selain itu, media harus memprioritaskan pelaporan yang berimbang dan

mendalam mengenai isu-isu kompleks, seperti IKN dan UU BUMN, serta mengkaji narasi resmi secara kritis. Hal ini akan memungkinkan publik untuk mendapatkan beragam perspektif, sehingga mereka bisa membentuk opini yang lebih terinformasi dan tidak terpengaruh oleh propaganda atau narasi yang dikendalikan. Masyarakat sipil dan akademisi juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan kritik berbasis data terhadap proyek IKN. Mereka harus terus melakukan penelitian dan pemantauan independen terhadap kemajuan dan dampak proyek ini, serta kebijakan terkait lainnya. Advokasi berbasis data dapat memperkuat kontra-narasi dan memberikan bukti kredibel untuk menantang metakomunikasi resmi. Selain itu, masyarakat sipil dan akademisi juga harus mendorong wacana publik dan edukasi kritis mengenai isu-isu kebijakan yang kompleks. Memberdayakan warga negara untuk menganalisis dan menguraikan pesan-pesan tersirat dalam *metakomunikasi politik* sangat penting untuk menjaga demokrasi yang sehat, menghindari manipulasi, dan mendorong partisipasi yang terinformasi.

Pembahasan

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara bukan sekadar perubahan geografis, tetapi mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, dan politik yang saling berinteraksi. Proses legislasi yang sangat cepat, yang hanya berlangsung 111 hari, telah memunculkan kritik mengenai minimnya keterlibatan publik dalam tahap perumusan kebijakan. Tapsell (2023) mencatat bahwa keputusan yang dibuat terburu-buru sering kali mengabaikan peran serta masyarakat, yang dapat merusak kredibilitas suatu kebijakan dalam jangka panjang. Hal ini sejalan dengan pandangan Fadhillah *et al.* (2022), yang menyatakan bahwa kurangnya ruang untuk dialog dalam proses pembuatan kebijakan dapat menyebabkan ketidakpercayaan dari berbagai pihak yang terpengaruh. Analisis metakomunikasi yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya membingkai proyek IKN sebagai simbol kemajuan dan pemerataan, dengan memanfaatkan simbol-simbol nasional seperti "Nusantara" dan "Pohon Hayat." Namun, kritik yang datang dari masyarakat sipil dan akademisi mengungkapkan sejumlah ketegangan terkait dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan,

serta kekhawatiran mengenai ketidakpastian finansial. Sebagaimana dibahas oleh Ghofur *et al.* (2024), kritik ini mencerminkan adanya perbedaan antara narasi pemerintah dan realitas yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam hal ini, keberhasilan proyek IKN tidak hanya ditentukan oleh pencapaian fisik semata, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah untuk merespons kritik secara terbuka dan membangun hubungan yang lebih transparan dengan publik. Kepercayaan masyarakat akan sangat bergantung pada seberapa konsisten tindakan pemerintah dengan pesan-pesan yang disampaikan, seperti yang disarankan oleh Azzahra *et al.* (2024) dalam penelitian mereka mengenai pentingnya komunikasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga jujur dan terbuka.

4. Kesimpulan dan Saran

Proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencerminkan inisiatif besar yang mencakup lebih dari sekadar pembangunan fisik. Dalam analisis ini, ditemukan bahwa legitimasi proyek ini tidak hanya bergantung pada aspek fisik dan ekonomi yang dijanjikan, tetapi juga pada cara pemerintah mengelola pesan-pesan eksplisit dan implisit yang diterima oleh masyarakat, media, dan pihak-pihak terkait. Narasi pemerintah berupaya menggambarkan IKN sebagai simbol perubahan positif yang merata dan berkelanjutan. Melalui simbol-simbol nasional seperti "Nusantara," "Pohon Hayat," dan "Istana Garuda," pemerintah berusaha membangkitkan rasa kebanggaan kolektif yang lebih besar dan menjadikan proyek ini sebagai langkah nasional yang lebih luas daripada hanya agenda politik sesaat. Strategi ini, yang juga melibatkan pesan verbal dan non-verbal dari Presiden Jokowi, menunjukkan kepemimpinan yang penuh keyakinan. Namun, meskipun pesan ini diperkuat oleh simbolisme dan komunikasi politik yang cermat, kekhawatiran mendalam yang terungkap melalui kritik publik menunjukkan adanya ketegangan antara narasi pemerintah dan realitas yang dirasakan masyarakat. Kritik yang datang dari masyarakat sipil dan akademisi menyoroti proses legislasi yang terburu-buru, dampak sosial dan lingkungan yang berpotensi merugikan, serta ketidakpastian finansial yang melingkupi proyek ini. Hal ini menciptakan pesan tentang "defisit demokrasi" dan "kerentanan finansial" yang semakin

memperlemah kepercayaan publik terhadap keberlanjutan dan integritas proyek IKN. Perbedaan antara narasi yang dikomunikasikan oleh pemerintah dan apa yang dirasakan oleh publik menghasilkan persepsi bahwa pemerintah mungkin tidak sepenuhnya memperhatikan dampak negatif yang mungkin muncul. Media memiliki peran kunci dalam membentuk persepsi publik melalui proses agenda-setting dan framing. Media massa dapat memperkuat baik narasi positif yang disampaikan pemerintah maupun kontra-narasi yang muncul dari publik atau pihak yang kritis. Selain itu, kasus revisi UU BUMN 2025, yang mengundang kritik tajam terkait pengurangan pengawasan dan potensi masalah hukum, mengilustrasikan bagaimana kebijakan dapat memberi pesan yang bertentangan dengan tujuan yang dinyatakan. Secara keseluruhan, keberhasilan jangka panjang proyek IKN akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah merespons kritik dan menyelaraskan pesan eksplisit dengan tindakan nyata. Transisi IKN dari proyek yang lebih terfokus pada warisan pemerintahan Presiden Jokowi menjadi proyek yang lebih nasional di bawah pemerintahan mendatang akan menguji kemampuan pemerintah dalam menjaga integritas dan kredibilitasnya. Keberlanjutan proyek ini memerlukan konsistensi dalam tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas. Keberhasilan pembangunan IKN yang berkelanjutan akan bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menyelaraskan pesan dan tindakan, membangun kepercayaan yang nyata, dan menghindari manipulasi persepsi. Integritas dalam tata kelola, yang tercermin dari keselarasan antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan, akan menjadi kunci utama dalam keberhasilan proyek ini.

5. Daftar Pustaka

- Al Azis, M. R. (2021). Regulasi dan Swa-Regulasi Indonesia dalam Penyelenggaraan Media Terkait Peran MNC Group terhadap Partai Perindo. *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 195-205.
<https://doi.org/10.23969/linimasa.v4i2.4098>.
- Álvarez-Peralta, M., Rojas-Andrés, R., & Diefenbacher, S. (2023). Meta-analysis of political communication research on Twitter: methodological trends. *Cogent Social Sciences*, 9(1), 2209371.
<https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2209371>.
- Danaditya, A., Ng, L. H. X., & Carley, K. M. (2022). From curious hashtags to polarized effect: profiling coordinated actions in Indonesian twitter discourse. *Social Network Analysis and Mining*, 12(1), 105.
- d'Haenens, L. (2022). Concentration of media ownership in Indonesia: A setback for viewpoint diversity. *International Journal of Communication*, 16, 2239-2259.
- Hariyadi, T. (2018, December). Runtuhnya pilar demokrasi, politik kuasa media partai perindo di mnc grup. In *Dynamic Media, Communications, and Culture: Conference Proceedings* (Vol. 1, pp. 110-130).
- Hidayaturrahman, M., Ngarawula, B., & Sadhana, K. (2022). Political investors: Political elite oligarchy and mastery of regional resources in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Politics*, 7(2), 269-281.
<https://doi.org/10.1177/2057891120917213>.
- Marwing, A. (2021). Indonesian Political Kleptocracy and Oligarchy: A Critical Review from the Perspective of Islamic Law. *Justicia Islamica*, 18(1), 79-96.
- Masduki. (2021). Media control in the digital politics of Indonesia. *Media and Communication*, 9(4).
<https://doi.org/10.17645/mac.v9i4.4225>.
- Priyanto, A. R., & Ghofur, A. (2024). Digital Conglomerates and Their Political Behavior: A Study on the Affiliation of MNC Group Owner Hary Tanoesoedibjo Towards the Presidential Candidacy of Ganjar Pranowo in the 2024 General Election. *Journal of Law, Politics and Humanities*, 4(3), 208-220.
- Sompotan, C., & Alvin, S. (2023). Political Communication Strategies through Video Podcast Campaign: A Case Study of Partai

- Perindo in Indonesia. *Journal of Social and Policy Issues*, 145-149. <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i3.207>.
- Sunardi, S. (2021). Oligarchy and Netizens Fighting Controlling Indonesia Media. *Jurnal Politik*, 7(2), 18.
- Syarief, S. (2022). *The media landscape in Indonesia: The more things change, the more they stay the same*. ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Tambunan, D. (2023). The intervention of oligarchy in the Indonesian legislative process. *Asian Journal of Comparative Politics*, 8(2), 637-653. <https://doi.org/10.1177/20578911231159395>
- Thomas, P. B., Hogan-Taylor, C., Yankoski, M., & Weninger, T. (2021). Pilot study suggests online media literacy programming reduces belief in false news in Indonesia. *arXiv preprint arXiv:2107.08034*. <https://arxiv.org/abs/2107.08034>.
- Zurriyati, Z., Rahman, F., & Alaqad, M. H. (2023). Language and Power: How News Media Construct a Biased Structure of Information in Public Discourse during the Presidential Election. *Malikussaleh Social and Political Reviews*, 4(1), 12-18. <https://doi.org/10.29103/mspr.v4i1.11031>.